

## **Perbandingan Efektivitas Peace Enforcement oleh Private Military Company dengan United Nations Peace Keeping Operation dalam Konflik di Sierra Leone**

Naufal Muhammad Firdaus<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, [naufalfirdaus23@gmail.com](mailto:naufalfirdaus23@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Konflik internal yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1991 adalah konflik yang berevolusi semenjak berakhirnya Perang Dingin, dimana konflik antarnegara mulai berkurang dan berubah menjadi konflik internal di dalam sebuah negara. Dalam hal ini upaya resolusi konflik pun perlu melakukan perubahan dimana cara baru seperti penggunaan kekerasan untuk mencapai perdamaian perlu digunakan. Dalam hal ini penggunaan konsep Efektivitas Militer akan digunakan untuk menganalisis efektivitas dari dua organisasi yang digunakan dalam Peace Enforcement yaitu UNPKO dan PMC. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana penulis akan berusaha mengeksplorasi cara yang digunakan oleh organisasi mana yang efektif dalam menanggulangi konflik di Sierra Leone. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa cara yang digunakan oleh PMC terbukti lebih efektif dibanding UNPKO yang dinilai berdasarkan 4 unsur Efektivitas Militer.

**Kata kunci:** *Efektivitas Militer, Penegakan Perdamaian, PMC, UNPKO*

### **ABSTRACT**

*The internal conflict that occurred in Sierra Leone in 1991 was a conflict that had evolved since the end of the Cold War, where conflicts between countries began to decrease and turned into internal conflicts within a country. In this case, conflict resolution efforts also need to make changes where new methods such as the use of violence to achieve peace need to be used. In this case the use of the concept of Military Effectiveness will be used to analyze the effectiveness of the two organizations used in Peace Enforcement, namely UNPKO and PMC. The method used is a qualitative research method where the author will try to explore the methods used by which organizations are effective in overcoming conflict in Sierra Leone. In this paper it was found that the method used by PMC proved to be more effective than UNPKO which was assessed based on 4 elements of Military Effectiveness.*

**Keywords:** *Military Effectiveness, Peace Enforcement PMC, UNPKO*

### **Pengantar**

Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan adanya pergeseran aktor yang dapat berkontribusi ke dalam Hubungan Internasional. Pada masa Perang Dingin hanya negara yang dipandang sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, namun saat ini aktor non-negara seperti organisasi antar negara dan perusahaan multinasional pun dapat menjadi aktor yang memiliki peran penting dalam politik internasional.

Selain adanya perubahan aktor dalam politik internasional, terjadinya *vacuum of power* di dunia internasional senantiasa merubah kondisi keamanan di dunia. Perubahan ini terjadi dikarenakan tidak ada negara *superpower* yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi atau *responsibility to protect* terhadap negara-negara berkembang yang dulunya bergantung kepada salah satu negara *superpower* pada masa Perang Dingin. Hal ini menyebabkan

munculnya situasi keamanan yang tidak stabil di negara berkembang dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.<sup>1</sup>

Untuk itu setelah berakhirnya Perang Dingin, negara berkembang yang masih memiliki konflik yang berujung kepada kekerasan dalam negeri dan tidak memiliki kapabilitas dalam meredakan konflik dihadapkan kepada dua pilihan dalam meredakan kekerasan akibat konflik, diantaranya: Pertama, negara yang sedang mengalami konflik dapat meminta bantuan kepada PBB untuk bertindak sebagai mediator dan meminta mereka untuk menempatkan pasukan perdamaannya di wilayah negara yang berkonflik untuk melindungi warga sipil dari kekerasan akibat konflik yang terjadi serta memastikan bahwa konflik tidak kembali meluas yang akhirnya menyelesaikan konflik. Kedua, negara yang sedang mengalami konflik di dalam negaranya dapat menyewa jasa PMC (*Private Military Company*) dalam menyelesaikan konflik dengan cara memenangkan peperangan dengan pihak yang dianggap sebagai ancaman negara.

Dalam konflik yang terjadi di dalam sebuah negara, baik PMC dan UNPKO memiliki kemampuan sebagai unsur *Peace Enforcement* yang dapat dijadikan sebagai upaya efektif dalam meraih *negative peace* di wilayah konflik dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Dalam tulisan ini akan mengangkat konflik yang telah terjadi di Sierra Leone sebagai contoh kasusnya. Dimana peran dari kedua pihak baik UNPKO dan PMC terlihat secara jelas.

Hal ini juga yang membuat penulis tertarik untuk kembali mengangkat isu resolusi konflik yang digunakan melalui kekerasan agar dapat meraih *negative peace* yang dilakukan oleh dua aktor yang memiliki pengaruh besar setelah Perang Dingin berakhir. Hal ini

dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup jelas mengenai cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga memunculkan kelebihan dan kekurangan masing-masing cara yang dilakukan. Dalam tulisan ini akan mendeskripsikan kedua cara tersebut yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan yaitu cara manakah yang paling efektif dilihat dari segi efektivitas militer yang dilakukan untuk memaksa kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai cara yang dilakukan ini namun kebanyakan tulisan tersebut hanya melihat dari satu sisi saja yaitu sisi PMC's atau sisi UNPKO. Dalam tulisan ini penulis membahas perbedaan cara meraih *negative peace* antara PMC dengan UNPKO tersebut yang nantinya akan dipilih mengenai cara yang terbaik berdasarkan pandangan penulis.

Salah satu contoh tulisan mengenai penggunaan PMC dalam melakukan *Peace Enforcement* di wilayah konflik adalah *From Enemy to Peacemaker: The Role of Private Military Companies in Sub-Saharan Africa* yang ditulis oleh Jesse Selber dan Kebba Kobarteh. Dalam tulisannya mereka berargumen bahwa di satu sisi memang PMC dapat dijadikan sebagai pilihan dalam melakukan intervensi militer ke dalam sebuah konflik untuk menegakan ketertiban. Namun di sisi lain terdapat juga dampak negatif dari digunakannya PMC ini, dimana dalam penggunaannya PMC seringkali gagal dalam mengevaluasi konflik yang pada akhirnya menghasilkan konflik-konflik kecil yang didasarkan kepada kepentingan perusahaan dibandingkan membangun keamanan di daerah pasca konflik.<sup>2</sup>

Namun terdapat juga tulisan yang mendukung penggunaan *Peace Enforcement* oleh PMC ini sendiri, contohnya *Peace*

---

<sup>1</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: a Comprehensive Survey*, New York, NY: Longman, 2008.

---

<sup>2</sup> Jesse Selber & Kebba Jobareth, "From Enemy to Peacemaker: The Role of Private Military Companies in Sub-Saharan Africa," *Medicine & Global Survival*; Vol.7. No. 2. February 2002.

*Building: The Private Sector's Role* yang ditulis oleh Allan Gerson. Dalam tulisan ini, PMC dipandang sebagai sektor privat yang dapat digunakan secara efektif dalam membuat perdamaian di wilayah konflik sehingga nantinya akan mendorong investasi yang datang dari luar negeri. Ketika sebuah negara dilanda konflik dan membutuhkan adanya bantuan secara langsung untuk meredakan konflik, PMC dipandang jauh lebih cepat dari sisi pergerakan pasukan dibandingkan dengan UNPKO yang memerlukan banyak birokrasi.<sup>3</sup>

Melihat dari kedua tulisan di atas yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dipahami bahwa persepsi manusia mengenai perdamaian itu sendiri berbeda satu dengan lainnya. Di satu sisi terdapat orang yang memandang bahwa dalam melakukan resolusi konflik di sebuah wilayah konflik nantinya memerlukan pembangunan perdamaian (*Peace building*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini PMC atau UNPKO. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang terpenting dalam resolusi konflik adalah tidak adanya kekerasan yang terjadi (*negative peace*) telah tercapai sehingga dalam proses pembangunan wilayah yang terdampak konflik diserahkan kepada pemerintahan yang berwenang dengan bantuan investasi luar negeri.

Dalam tulisan ini *peace enforcement* digunakan sebagai instrumen dari resolusi konflik itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Butros-Ghali dalam *UN Agenda for Peace* di tahun 1992 yang memberikan adanya kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan. Dalam keputusan menggunakan kekerasan dalam resolusi konflik sendiri tidak dapat serta merta dilakukan tanpa adanya batasan tertentu.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam membahas mengenai upaya mencapai perdamaian (*Peace*) tidak dapat dipisahkan dengan keamanan (*Security*). Hal ini didukung oleh pernyataan Anatol Rapoport dalam buku *Reclaiming Peace in International Relations* dimana beliau berpendapat bahwa perdamaian dapat diraih melalui *power, balance of power, collective security, peace through law, pacifism*.<sup>5</sup> Sehingga instrumen kekerasan yang digunakan dalam mencapai kedamaian dibenarkan dalam penggunaannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Johan Galtung menilai bahwa perdamaian sendiri dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fleksibel, dinamis dan pemberi kehidupan. Perdamaian juga tidak harus memiliki sebuah satu pengertian yang bersifat umum melainkan perdamaian sendiri dapat dipahami melalui banyak definisi lainnya yang disesuaikan dengan kultur dan ideologi.<sup>6</sup>

Dengan adanya hal tersebut, konsep perdamaian sendiri digunakan secara terfokus kepada pengembangan dari konsep perdamaian itu sendiri, contohnya ketika kebanyakan orang memandang perdamaian sebagai terciptanya keharmonisan dan ketersinambungan, masih banyak orang yang memandang perdamaian dengan cara lain. Seperti adanya pandangan bahwa perdamaian adalah tidak adanya kekerasan yang terjadi. Hal ini bukan menjadi kelemahan bagi konsep perdamaian itu sendiri melainkan akan menjadi sebuah upaya kontribusi demi terciptanya banyak alternatif dari konsep perdamaian itu sendiri yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan perang dan kekerasan yang bersifat struktural, budaya dan fisik.<sup>7</sup>

Dalam tulisan ini perdamaian dipahami sebagai ketidakadaannya kekerasan dan

<sup>3</sup> Allan Gerson, "Peace Building: The Private Sector Role," *The American Journal of International Law*, Vol. 95, No.1, January 2001, pp. 102-119.

<sup>4</sup> Charles Webel & Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, London: Routledge, 2007

<sup>5</sup> Oliver P. Richmond, *Reclaiming Peace in International Relations. Millennium: Journal of International Studies* 36, no. 3 (2008). <https://doi.org/10.1177/03058298080360030401>.

<sup>6</sup> C. G. Jacobsen, J. Galtung, K. F., Brand-Jacobsen, *Searching for Peace The Road to Transcend*. London: Pluto Press. 2014

<sup>7</sup> *Ibid*

terciptanya ketertiban di sebuah wilayah atau negara. Perdamaian itu sendiri tidak mungkin untuk tercapai apabila masih ada korban manusia yang berjatuh. Dalam hal ini *negative peace* masih belum tercapai, untuk itulah *Peace Enforcement* dibutuhkan agar dapat memaksa pihak yang berkonflik untuk segera berdamai atau minimal diterapkannya gencatan senjata yang serius untuk dilakukan untuk meredakan kekerasan yang terjadi dan barulah Peace dapat berjalan dengan baik.

Namun Peace tidak akan terlaksana apabila wilayah yang berkonflik masih belum *Secure* atau aman. Dalam hal ini keamanan (*Security*) didefinisikan sebagaimana yang dikemukakan oleh McGrew dimana keamanan adalah sebuah pemeliharaan akan perdamaian dan perlindungan terhadap ketertiban sosio-ekonomi dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan sekaligus menciptakan ketertiban internasional dan domestik untuk meminimalisir ancaman yang berpotensi mengancam nilai utama dan kepentingan sebuah bangsa.<sup>8</sup> De Coning juga menyebutkan bahwa tantangan kepada kemanan menuntun kepada konsep *Peacekeeping* dan *Peace Enforcement* dimana kedua konsep ini seringkali digunakan secara bergantian meskipun dari definisinya tidak sama. *Peacekeeping* adalah sebuah teknik dimana adanya sebuah upaya untuk mengembalikan kondisi damai dari keadaan sosial yang berbahaya dimana kekerasan masih terjadi. Dalam penerapannya hal tersebut melibatkan militer, polisi dan sipil sebagai model untuk mengawasi gencatan senjata yang terjadi antar kedua belah pihak yang berkonflik. Fokus utama dari *Peacekeeping* sendiri adalah menjalankan fungsi pengawasan demi memenuhi kebutuhan akan kebebasan dan hak warga sipil yang terlibat konflik masih

terpenuhi sampai keadaan di wilayah konflik tersebut kembali normal.<sup>9</sup>

Dalam tulisan ini dipahami bahwa resolusi konflik dengan melakukan pemaksaan terhadap pihak yang berkonflik (*Peace Enforcement*) dapat berhasil dalam mencapai *negative peace* sehingga tulisan ini akan berusaha untuk menjustifikasi beberapa penelitian sebelumnya terkait *Peace Enforcement* yang digunakan. Namun yang menjadikan pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas perbedaan efektivitas aksi militer yang dilakukan oleh PMC dengan UNPKO.

### Peace Enforcement

Setelah penjelasan mengenai *Peace Enforcement* diatas dapat dipahami bahwa dalam resolusi konflik dapat dicapai menggunakan cara kekerasan. Namun perlu dipahami juga bahwa badan yang memiliki kewenangan dalam penggunaan cara kekerasan tersebut pun tidak dapat dipilih secara sembarang, melainkan dalam hal ini terdapat 2 badan atau organisasi yang memiliki hak akan penggunaan cara tersebut.

adapun PBB yang memiliki kewenangan dalam melakukan *Peace Enforcement* melalui Dewan Keamanan PBB dalam pengoperasiannya, dalam penggunaannya dimana kebutuhan akan penggunaan *Peace Enforcement* mulai meningkat Dewan Keamanan PBB akan membuat sebuah “kontrak” kepada salah satu negara anggota dewan atau membuat sebuah koalisi dalam melakukan *Peace Enforcement* tersebut, contohnya seperti operasi yang dilakukan di Korea pada tahun 1950-an dan di Irak pada tahun 1991 yang menggunakan sistem kontrak kepada Amerika Serikat dan koalisinya dalam memenuhi mandat *Peace Enforcement*.

Dalam hal ini PBB yang dipandang mampu untuk menjalankan *Peacekeeping*

---

<sup>8</sup> T. McGrew, (1988). *Security and Order: The Military Dimension*, dalam Johnson, U, *West Africa: From Peacekeeping to Peace Enforcement*, Conflict Studies Quarterly, 22 January 2018, pp 7

---

<sup>9</sup> Cedric De Coning, *Peace Enforcement in Africa: Doctrinal Distinctions between the African Union and United Nations. Contemporary Security Policy* 38, no. 1. 2017. <https://doi.org/10.1080/13523260.2017.1283108>.

ternyata organisasi ini juga mampu dalam menjalankan *Peace Enforcement* karena memiliki kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni dalam pengoperasiannya, namun Dewan Keamanan PBB juga memerlukan sebuah aturan yang dibuat oleh Dewan PBB agar resolusi yang dibuat tepat guna dan tepat sasaran karena apabila hanya merujuk kepada UN Charter hal tersebut sangatlah bersifat luas dan spesifik sehingga ditakutkan penggunaan kekerasan dalam upaya menangani konflik akan menemui masalah.

Selanjutnya aturan untuk penggunaan kekerasan ini pun nantinya akan memunculkan SOFA (*Status of Forces Agreement*) atau SOMA (*Status of Mission Agreement*) diantara PBB dengan negara yang akan menjadi tuan rumah operasi *Peacekeeping* ini, contohnya seperti yang terjadi di Kongo pada tahun 1960an dimana SOFA yang digunakan adalah ketika kekerasan hanya digunakan oleh tentara PBB dalam situasi yang sangat buruk sehingga mereka memerlukan unsur kekerasan dalam upaya mempertahankan diri atau hidup mereka, dan kebanyakan SOFA yang telah dijalani didalamnya tidak memasukan elemen kekerasan karena ditakutkan negara tuan rumah merasa ketakutan pada saat elemen kekerasan tersebut ada pada pasukan yang dikirim ke negaranya. Lebih spesifik lagi nantinya SOFA akan diperkecil definisinya menjadi ROE (*Rules of Engagement*) bagi para tentara yang tergabung ke dalam *Peacekeeping Force* untuk pengaplikasian di medan *Peacekeeping* sehari hari yang didalamnya terdapat instruksi-instruksi khusus yang dapat dilakukan oleh mereka apabila terjadi kontak senjata dengan pihak yang berkonflik.<sup>10</sup>

Selain PBB masih terdapat juga aktor yang memiliki kemampuan dalam menjalankan misi perdamaian, karena seiring berkembangnya lingkungan internasional dikarenakan adanya globalisasi dan berakhirnya Perang Dingin memunculkan

aktor baru yang berpotensi dalam pengembangan upaya perdamaian, dalam hal ini adalah PMC's. Pada masa pasca Perang Dingin ini, PMC's menjadi salah satu aktor yang tidak dapat diabaikan dalam upaya pencapaian perdamaian. Hal ini dikarenakan kebanyakan operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masih jarang atau tidak pernah sama sekali memasukan unsur pemaksaan atau kekerasan dalam operasinya.

Padahal hal tersebut sangatlah penting demi memastikan bahwa operasi tersebut berjalan dengan lancar. Salah satu contoh konflik yang membutuhkan unsur kekerasan dalam menjaga perdamaian ini terlihat secara jelas pada misi PBB di Somalia yang bernama UNITAF (*United Task Force in Somalia*) dimana PBB saat itu merespon adanya krisis kemanusiaan yang terjadi disana dan situasi di negara tersebut sangat berbahaya sehingga penggunaan kekerasan demi menanggulangi krisis yang menyangkut kemanusiaan menjadi hal yang perlu untuk dilakukan.

Dalam hal menjaga perdamaian ini, negara-negara pengirim kontingen penjaga perdamaian seringkali dihadapkan kepada situasi yang cukup rumit. Dimana dalam satu sisi mereka ingin berkontribusi kepada perdamaian di dunia, namun mereka pun tidak ingin menempatkan pasukan negara mereka ke zona berbahaya yang dapat mengancam hidup mereka. Hal ini seringkali berakibat kepada hilangnya fungsi mereka sebagai pasukan perdamaian yang bertugas untuk menjaga perdamaian.

Berbeda dengan UNPKO, PMC's dapat masuk untuk menjaga perdamaian tersebut apabila diminta oleh pemerintah yang berwenang di negara tersebut. Dikarenakan personel yang dimiliki oleh PMC's sudah siap jika ditempatkan pada daerah konflik. Dalam contoh kasus yang dapat diangkat dalam hal ini adalah, PMC's yang berasal dari Afrika Selatan bernama *Executive Outcomes*, siap untuk menegakan perdamaian di negara yang sedang berkonflik bersama pemerintahan yang sedang berjalan di negara tersebut.

---

<sup>10</sup> Trevor Findlay, *The Use of Force in UN Peace Operations*, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 2002

Keberhasilan PMC's dalam perannya sebagai *Peace Enforcement* dapat dilihat dalam konflik yang terjadi di negara Angola, ketika mereka berhasil untuk mengalahkan pasukan separatis yang bernama UNITA (*National Union for the Total Independence of Angola*) pada 1994.

Setelah mendengar keberhasilan dari PMC's di Angola. Negara lain yang memiliki konflik dengan separatis dalam hal ini negara Sierra Leone langsung melakukan kontrak dengan EO (*Executive Outcomes*) untuk menanggulangi permasalahan dengan RUF (*Revolutionary United Front*). Dalam kontrak tersebut juga, EO diminta untuk membangun kembali keamanan dan kekuatan ekonomi di negara tersebut sebagai salah satu hal diperlukan untuk pembangunan dalam negeri. Setelah 2 tahun dari penggunaan PMC's tersebut, pada tahun 1996 sektor-sektor penting yang dimiliki oleh pemberontak RUF berhasil dihancurkan dan mereka telah mundur dari ibukota Sierra Leone itu sendiri yaitu Freetown dan setelah kontrak berakhir pada tahun 1997. Namun kekerasan kembali muncul di negara tersebut dan PMC's mengatakan bahwa upaya internasional dalam menciptakan kestabilan di negara tersebut akan jauh lebih berhasil apabila dengan adanya *Peace Enforcement* yang dilakukan oleh PMC's tersebut.<sup>11</sup>

### **Efektivitas Militer**

Melihat pembahasan sebelumnya yang menerangkan bahwa pencapaian perdamaian dapat dilakukan dengan cara kekerasan, dapat dipahami juga bahwa penggunaan kekerasan yang efektif dalam memenangkan salah satu pihak dalam konflik menjadi penting untuk dibahas.

Unsur yang akan dibahas dalam hal ini adalah efektivitas militer itu sendiri yang dipahami sebagai kemampuan untuk membuat sebuah kekuatan militer berdasarkan sumber

kekayaan sebuah negara, teknologi yang dimiliki, jumlah populasi, dan kemampuan sumber daya manusia. Tingkatan efektivitas sebuah militer pun bervariasi berdasarkan penggunaan sumber daya kekayaan negara dan sumber daya manusia nya.

Terdapat 4 atribut yang penting dalam mengukur efektivitas militer yaitu: Pertama, Integrasi aktivitas militer yang ada di tingkatan yang berbeda beda. Kedua, Respon kepada keadaan konflik internal maupun eksternal. Ketiga, Skill atau kemampuan yang dinilai dari kemampuan dasar setiap personel tentara. Keempat, Kualitas dimana dinilai dari perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan fungsi militer tersebut. Keempat atribut tersebut akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.<sup>12</sup>

Pertama, Integrasi dimana dalam hal ini dijelaskan sebagai aktivitas militer yang secara internal berjalan secara konsisten dan saling memperkuat satu sama lainnya di berbagai cabang militer yang ada didalam sebuah negara. Hal ini menjadi penting untuk membuat sebuah hubungan secara strategis, operasional dan taktis demi mencapai keinginan yang dituju. Integrasi juga dikonsepsikan sebagai cara dari instrumen militer untuk mencapai kepentingan politik sebuah negara. Integrasi juga melibatkan pemeliharaan yang konsisten dalam hal pengerahan pasukan, pengadaan alat militer, pelatihan dan pendidikan dengan dilatarbelakangi oleh strategi, operasi, dan taktik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah pencapaian sebuah kekonsistenan semua cabang, wilayah operasi dan tingkatan semua instrumen militer yang ada di dalam sebuah negara.

Kedua, Respon yang didefinisikan sebagai kemampuan sebuah instrumen militer dalam menstrukturasi instansi militernya, pengorganisirannya, pelatihan serta memiliki

---

<sup>11</sup> Christopher Spearin, "UN Peacekeeping And The International Private Military And Security Industry". *International Peacekeeping* 18 (2): 196-209. 2011 doi:10.1080/13533312.2010.546099.

---

<sup>12</sup> Risa Brooks, and Elizabeth A. Stanley, *Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.

peralatan yang memadai dalam operasi strategis yang akan dijalankan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan doktrin untuk mengeksploitasi kekurangan dan kemampuan yang dimiliki.

Ketiga, Kemampuan yang dalam hal ini dinilai dari sebagaimana keahlian sebuah instrumen militer dalam mencapai tujuan dan kepatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh atasan. Hal ini termasuk kemampuan militer untuk mengadopsi teknologi baru dan menerapkan doktrin terbaru yang dituntut dari sebuah kemampuan militer yang harus dimiliki.

Namun hal tersebut tidak terbatas kepada bagaimana cara dia merawat senjata yang dia pergunakan, penggunaan komputer atau teknik pergerakan yang dilakukan secara taktis. Kemampuan ini juga melihat bagaimana sebuah militer dapat memotivasi tentaranya untuk meyakinkan dapat menjalankan perintahnya, berjuang secara keras, dan dapat mengambil keputusan dalam sebuah pertempuran, sebuah militer yang dapat membuat tentaranya dapat berjuang keras dan membuat keputusan di lapangan dipandang sebagai salah satu hal yang memperkuat instrumen *power* dari militer itu sendiri. Maka dari itu pelatihan militer bagi para petinggi dan bawahan dipandang sangat penting agar mereka mengetahui dasar operasi mereka digerakan oleh unsur sosial, politis ataupun institusional yang dapat membuat personel militer tersebut lebih termotivasi dalam melakukan tugasnya di lapangan.

Keempat, Kualitas dimana dalam hal ini kualitas dipandang sebagai sebuah atribut yang dimiliki oleh militer itu sendiri yaitu penggunaan Alutsista (*Alat Utama Sistem Persenjataan*) yang modern dan memiliki kapabilitas yang baik. Kualitas ini dilihat dari peralatan yang digunakan memiliki tingkat perusakan terhadap target secara tinggi, ketahanan, mobilitas dan memiliki tingkat kegagalan yang rendah dalam menyerang targetnya.

Keefektifan instrumen militer inipun akan menilai sebuah perencanaan dan pengadaan

yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai sebuah kualitas yang diinginkan.

Namun dengan kepemilikan Alutsista yang baik dan canggih bukan berarti peralatan tersebut dibutuhkan, dapat digunakan, memiliki kelayakan untuk dibeli namun lebih ditekankan kepada keefektifan biaya yang harus dikeluarkan.

### **PMC's (Private Military Companies)**

Dengan berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, membuat Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin mengurangi anggaran militernya dikarenakan ancaman terbesarnya sudah tiada. Hal tersebut berdampak kepada negara-negara berkembang yang dulunya dibantu oleh salah satu blok baik timur maupun barat dalam menanggulangi permasalahan dalam negerinya. Sehingga yang terjadi di negara berkembang yang masih memiliki konflik dalam negeri pasca Perang Dingin adalah tidak mampunya negara dalam menanggulangi konflik tersebut yang berakibat pada banyaknya korban yang berjatuh.

Meluasnya konflik yang terjadi di dunia pasca Perang Dingin sebagai akibat dari tidak adanya kepentingan negara adidaya, telah membuat kekosongan kekuasaan dalam sektor keamanan yang dibutuhkan dalam terciptanya dunia yang aman dan tertib.

Dalam hal ini PMC's yang memiliki domain publik dan bergerak di industri keamanan dunia, menjadi salah satu aktor baru dalam situasi konflik yang telah berubah ini. Peran PMC's dalam menjaga perdamaian dipandang sebagai peran yang cukup memberikan pengaruh kepada sektor keamanan di dunia, hal ini dikarenakan apabila tidak adanya PMC's di wilayah yang berkonflik kemungkinan konflik tersebut akan berakhir dengan tragis ataupun konflik selesai dengan cara yang tidak baik atau tidak efisien. Sehingga ditakutkan setelah konflik terjadi

akan ada konflik susulan sebagai hasil dari penyelesaian konflik yang tidak baik.<sup>13</sup>

Penggunaan PMC's yang meluas pasca Perang Dingin ini adalah sebagai hasil tidak adanya kepentingan negara-negara adidaya yang ada didalam negara yang sedang berkonflik yang disebabkan keengganan mereka untuk mengirim pasukannya untuk masuk dan menstabilkan konflik yang sedang terjadi. Untuk itu negara yang sedang mengalami konflik harus memilih jalur alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam negaranya dimana salah satunya adalah menyewa jasa PMC's ini. Penggunaan jasa dari PMC's ini adalah pilihan yang masuk akal dalam resolusi konflik, hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh PMC's itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PMC's ini adalah personil yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam konflik yang melibatkan kontak senjata serta peralatan sistem persenjataan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut pun tergolong canggih. Seperti helikopter tempur, kendaraan lapis baja, meriam artileri, sampai pesawat tempur untuk mendukung operasinya di negara yang telah melakukan kontrak.<sup>14</sup>

Dalam dunia keamanan, PMC's ini perlu dibedakan *Mercenaries*. Perbedaan yang signifikan antara *Mercenaries* dengan PMC's dimana *Mercenaries* bekerja untuk kepentingan ekonomi sedangkan PMC's bertindak sebagai perusahaan yang bekerja di negara yang sedang berkonflik dan merekapun memiliki standarisasi tersendiri dalam berbagai operasinya sehingga PMC's telah memiliki tujuan dan strategi sebagaimana yang telah disetujui oleh perjanjian yang telah dibuat

antara PMC's dengan negara yang memiliki kontrak.

Dalam menjalankan fungsi mereka sebagai aktor keamanan pun PMC's bisa menjadi aktor yang spesifik, contohnya seperti mereka dapat menjadi perusahaan perbantuan logistik, pelatihan militer, broker jual-beli sistem persenjataan, intelijen sampai kepada penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan peperangan langsung di lapangan. Motif utama yang dimiliki oleh PMC's sendiri adalah kepentingan ekonomi perusahaan. Mereka pun memiliki sistem rantai komando yang efektif dalam organisasi mereka, sehingga antara tujuan dengan apa yang dilakukan di lapangan menjadi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang mengontrak jasa mereka.

Sejak tahun 1990an penggunaan PMC's sebagai unsur *Peace Enforcement* diperbolehkan berkaca kepada *Chapter VII UN Charter* dimana penggunaan segala cara untuk mencapai perdamaian diperbolehkan. Dalam menggunakan jasa PMC's ini memang dibatasi kepada negara yang masih memiliki pemerintahan berdaulat dan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini terlihat bahwa PBB sendiri sebagai organisasi internasional dunia mengakui keunggulan dari PMC's ini dibandingkan dengan pasukan perdamaian yang dimilikinya.<sup>15</sup>

Penggunaan PMC's ini adalah sebagai akibat dari banyaknya negara adidaya yang notabene menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB mulai enggan untuk mengirimkan personil militernya dalam menanggulangi konflik yang terjadi di dunia. Namun di sisi lain, konflik yang terjadi semakin meluas, akibatnya PBB mengalami kekurangan dalam jumlah pasukan perdamaian karena jika hanya mengandalkan kekuatan pasukan dari negara berkembang seperti Bangladesh, Pakistan, Ethiopia, dll yang notabene menyumbang beberapa ribu personil

---

<sup>13</sup> Ian D. Jefferies, *Private Military Companies – A Positive Role to Play in Today's International Systems*, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2002

<sup>14</sup> Anita M. Gahan, *Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry After the Cold War*, Rotman School of Management, University of Toronto, 2009

---

<sup>15</sup> P. W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.

tetapi mereka tidak dilengkapi dengan perlengkapan dan pelatihan yang memadai sehingga dalam penggunaannya di dalam misi perdamaian PBB pun menjadi kurang efektif. Untuk itu PMC's dimanfaatkan dan mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan jasa pengamanan militer yang profesional demi tercapainya misi perdamaian PBB.<sup>16</sup>

Di benua Afrika sendiri, dimana konflik sangat rawan untuk terjadi baik konflik yang bersifat antar negara maupun konflik yang terjadi didalam negara, peran PMC's masih dibutuhkan disana sebagai salah satu pasukan yang memiliki kemampuan profesional dalam meredakan konflik. Meskipun pandangan para pengambil keputusan yang ada di Afrika masih tertuju kepada PMC's adalah "tentara bayaran" atau *Mercenaries* yang berkedok perusahaan dan dapat menyebabkan destabilisasi keadaan politik disana. Dalam kenyataannya keberadaan PMC's di Afrika sendiri dipandang sebagai aktor yang penting dan berguna untuk digunakan sebagai instrumen resolusi konflik disana, contohnya pada saat kebanyakan negara-negara di benua Afrika tidak memiliki angkatan bersenjata yang kuat untuk menjaga semua wilayah teritorialnya dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negaranya, PMC's hadir dan mampu untuk memberikan bantuan yang bersifat kontak senjata langsung maupun dukungan logistik dan pelatihan yang diperlukan dalam upaya pertahanan negara tersebut.

Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam keefektifan penggunaan PMC's di benua Afrika adalah pada saat pemerintah Angola dan Sierra Leone membutuhkan bantuan dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang berniat untuk mengukudeta pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satu perusahaan PMC's yang bergerak di Afrika yaitu *Executive Outcomes* dapat memberikan jasa yang kedua negara

tersebut butuhkan dalam waktu singkat dibandingkan dengan bantuan pasukan perdamaian PBB yang dapat memakan waktu yang lebih lama.

Dalam kondisi damai pun PMC's di benua Afrika dapat digunakan sebagai lembaga yang dapat mengembangkan kapabilitas dan kemampuan angkatan bersenjata negara-negara yang ada disana. Dengan peralatan tempur yang lengkap serta pengalaman didalam konflik yang cukup PMC's juga dapat memberikan bantuan intelijen dan pengintaian yang dibutuhkan oleh negara-negara Afrika demi meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata nya.<sup>17</sup>

Berakhirnya Perang Dingin memiliki beragam efek kepada negara-negara di Afrika khususnya pada bidang keamanan. Jika dilihat memang Afrika Selatan dan Ethiopia yang sangat jelas memiliki keuntungan dalam hal keruntuhannya rivalitas antara dua superpower ini, namun di wilayah Afrika tengah dan Afrika barat memiliki dampak negatif dari ketidakadaannya *superpower* ini yang berakibat pada meningkatnya tingkat kekerasan yang terjadi pada tahun 1990an.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 EO (*Executive Outcomes*) yang telah menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan yang paling baik dan dikenal secara luas di dunia menjadi "pelindung" bagi negara-negara di Afrika yang sedang mengalami konflik yang bersifat internal.

Perusahaan EO adalah sebuah perusahaan militer yang dimiliki secara pribadi dimana didalamnya memiliki kurang lebih 2,000 tentara veteran yang berasal dari bekas SADF (*South African Defence Force*) yang terbukti telah membantu menyelesaikan permasalahan separatist yang ada di Angola dan Sierra Leone.

Pada masa itu masih banyak negara di Afrika memerlukan jasa dari EO ini dan dalam hal ini pun EO menekankan bahwa hanya akan

---

<sup>16</sup> Tina Linti, UN Use of Private Military and Security Companies in Peacekeeping Operations-Is There a Legal Basis, *Politikon: IAPSS Political Science Journal* vol. 29. 2016. pp 142-145

---

<sup>17</sup> Tshepo Gwatiwa, *Private Military and Security Companies Policy in Africa: Regional Policy Stasis as Agency in International Politics*, *Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies* vol. 44 No.2, 2016

bertempur apabila disewa oleh pemerintahan negara Afrika yang berdaulat dan strategi operasi yang dijalankan disana berfokus kepada pembentukan struktur militer yang profesional dan meningkatkan kemampuan militer negara tersebut tanpa bantuan dari pihak asing. Dalam melakukan tugasnya pun EO tidak segan untuk turun langsung mengirimkan pasukannya dalam pertempuran.<sup>18</sup>

Selain itu EO juga hadir sebagai kekuatan penstabil bagi perkembangan wilayah Afrika dan bagi sebagian pengamat militer memandang EO sebagai alternatif dari tentara Afrika Selatan yang telah menjadi salah satu tentara yang paling mematikan namun efisien di waktu yang bersamaan dalam operasinya dalam wilayah Sub-Sahara Afrika. Sebagian besar tentara yang bekerja di EO datang dari bekas Battalion ke-32 tentara Afrika Selatan yang didalamnya terdapat “*Reconnaissance Commandos*”, “*Parachute Brigade*”. Grup ini adalah kelompok paramiliter yang menjadi ujung tombak dalam destabilisasi militer yang ada di Afrika Selatan pada tahun 1980an.

Pasukan Khusus SADF juga menjadi ujung tombak dari operasi EO di Angola dan mereka terkenal karena seringkali menyelamatkan komandan UNITA dari jurang kekalahan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ternyata EO juga adalah sebuah anomali dalam militer, hal ini disebabkan meskipun mereka tidak memiliki peralatan militer yang sangat canggih dan kekuatan manusia nya pun hanya berjumlah 2,000 orang yang berasal dari bekas SADF atau SAP (*South African Police*). Dapat dilihat bahwa meskipun hanya berjumlah 2,000 orang namun semua personel tersebut sebelumnya pernah terlibat dalam banyak operasi militer dan memiliki banyak pengalaman dan EO pun memberikan tunjangan yang sangat menarik bagi mereka dimana gaji per pegawainya rata rata sebesar \$3,500 dan bagi pilot atau komandan sebuah

negara akan menerima sebesar \$7,500 setiap bulannya.<sup>19</sup>

### **Perbandingan Efektivitas *Peace Enforcement* dalam Konflik di Sierra Leone**

Sebelum membahas mengenai efektifitas *Peace Enforcement* yang dilakukan di Sierra Leone, ada baiknya untuk terlebih dulu memahami mengenai konflik yang terjadi disana. Sierra Leone terletak di bagian barat benua Afrika dengan luas wilayah sebesar 71.740 meter persegi dan memiliki penduduk sebanyak 5,2 juta penduduk. Sierra Leone merdeka dari Inggris pada 27 April 1961 dan setelah merdeka dari Inggris negara tersebut mulai mengalami masalah pada saat sistem satu partai yang dijalankan di negara tersebut menunjukkan permasalahan seperti korupsi. Hal tersebut terjadi pada saat Siaka Stevens berkuasa dengan bantuan jenderal yang bernama General Joseph Momoh. Pada masa kekuasaannya Siaka Stevens membiarkan adanya kerusakan yang ada didalam sistem pemerintahan dan militernya yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Pada akhir tahun 1980an mulai adanya gerakan untuk melawan pemerintahan dari Joseph Momoh yang pada saat itu menjabat sebagai presiden dan masih menganut sistem satu partai. Gerakan separatis tersebut adalah RUF (*Revolutionary United Front*) yang diorganisir oleh Foday Sankoh dimana organisasi tersebut menganut ideologi mengenai demokrasi dan ingin menerapkan sistem multi partai. Namun tujuan sebenarnya dari grup tersebut lebih termotivasi oleh keuntungan finansial yang didapatkan dari berbagai tambang mineral atau berlian yang terdapat di Sierra Leone. Pada tahun 1991 RUF mulai menyerang Sierra Leone dengan menyeberang perbatasan Liberia dan

<sup>18</sup> Angga Nuridin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta, 2015.pp.160

<sup>19</sup> Herbert M. Howe, "Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes," *The Journal of Modern African Studies* 36, no. 2 (1998): 307-31. doi:10.1017/s0022278x98002778.

menduduki wilayah tambang berlian di kota Kono.<sup>20</sup>

Dengan jumlah tentara Sierra Leone yang sedikit dibanding dengan jumlah gerilyawan RUF, Joseph Momoh membuat sebuah rekrutmen besar-besaran yang membuat jumlah personil militernya yang awalnya berjumlah 3.000 personel menjadi 14.000 personel dalam beberapa bulan. Namun tentara tersebut tidak memiliki pelatihan yang baik dan tidak memiliki pengalaman bertempur sehingga terkadang tentara Sierra Leone tersebut seringkali membelot ke RUF dikarenakan keuntungan finansial yang didapat dari penjarahan yang mereka lakukan kepada warga sipil.

Pada akhirnya tahun 1992 Joseph Momoh dikudeta sehingga digantikan oleh Valentine Strasser, dimana pada saat itu Strasser berusaha untuk membuka negosiasi untuk diadakannya gencatan senjata diantara kedua belah pihak, namun meskipun dengan bantuan PBB, RUF menolak untuk adanya gencatan senjata tersebut. Melihat upaya negosiasinya gagal Strasser berpaling kepada opsi lain yang lebih menggunakan kekerasan dimana Strasser pada saat itu tertarik dengan keberhasilan PMC yang bernama *Executive Outcomes* yang membuat pemerintah Angola menang untuk kembali berkuasa setelah adanya konflik.<sup>21</sup>

Kesuksesan EO dalam menanggulangi masalah gerilyawan di Angola membuat banyak ketertarikan di benua tersebut untuk menyelesaikan masalah gerilyawan di negaranya sendiri. Akhirnya pada bulan Mei 1995, Sierra Leone menyewa jasa EO untuk membantu melawan RUF yang telah terjadi selama 4 tahun terakhir dan pada bulan tersebut juga sekitar 20 mil jauhnya dari ibukota Sierra Leone yaitu Freetown, RUF

mulai bergerak dengan kekuatan kurang lebih dengan beberapa ribu gerilyawan. Perlawanan dari RUF ini menyebabkan lebih dari 1,5 juta penduduk Sierra Leone mengungsi ke negara benua Afrika lainnya dan setidaknya telah membuat kurang lebih 15,000 orang tewas karena konflik ini. Perekonomian Sierra Leone pun turut hancur akibat konflik ini yang disebabkan banyak jalan yang ditutup sehingga berakibat kepada terganggunya proses penambangan bauksit dan berlian disana.

Dalam menangani masalah ini, tentara RSLMF (*Republic Sierra Leone Military Forces*) sebetulnya telah terbentuk pada masa itu namun kapabilitas mereka sangat terbatas sehingga tidak dapat menanggulangi masalah yang terjadi, mereka sulit dipandang sebagai sebuah tentara hal ini dikarenakan mereka memiliki kekuatan personil sebanyak 14.000 tentara namun 2/3 nya direkrut secara cepat sehingga banyak dari mereka tidak mendapatkan doktrin maupun pelatihan yang baik dalam upaya menjalankan tugasnya. Dengan begitu seringkali tentara Sierra Leone dipandang dengan terminologi "*sobel*s" yang memiliki arti mereka adalah tentara reguler pada siang hari namun pada malam hari mereka berubah menjadi gerilyawan dikarenakan keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil penjarahan dan seringkali mereka pun saling bertikai satu dengan lainnya.

Pada saat itu EO masuk dengan sebuah proposal kepada Strasser dimana pada saat itu pemerintah Sierra Leone menolak karena tidak dapat membayarnya, namun EO menyebutkan bahwa Sierra Leone dapat membayar hutangnya kapan saja pada saat mereka mampu dan EO juga menekankan agar Sierra Leone membuat sebuah usaha untuk mendemokratisasi negaranya. Proses pengiriman tentara EO tergolong sangat cepat dimana mereka memiliki kemampuan untuk jasa yang bersifat teknis, penyediaan personel untuk bertempur dan jasa untuk pelatihan tentara baru Sierra Leone.

Pada Mei 1995 sebanyak 30 personil EO datang dan dalam jangka waktu beberapa

<sup>20</sup> Osita Agbu, *West Africa's Trouble Spots and the Imperative for Peace-building (Monograph Series)*. African Books Collective, 2006. pp 32

<sup>21</sup> Leslie Hough, "A Study of Peacekeeping, Peace-enforcement and Private Military Companies in Sierra Leone," *African Security Review* 16, no. 4 (2007): 10-11, doi:10.1080/10246029.2007.9627441.

minggu saja mereka mampu untuk melatih dan menyiapkan sebanyak 150 tentara Sierra Leone yang siap untuk bertugas dengan kemampuan yang profesional. Tugas pertama mereka adalah memukul mundur pergerakan RUF agar jauh dari ibukota Freetown, melindungi distrik penambangan berlian di Kono dan membuka kembali jalan di Sierra Leone untuk memperlancar distribusi makanan dan bahan bakar minyak. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 1996 EO dan tentara Sierra Leone yang terlatih telah mengambil alih wilayah perairan bagian selatan dimana di wilayah tersebut terdapat tambang bauksit yang dimiliki oleh perusahaan *Sieromco*. Pada saat menjalankan misi selama kurang lebih 1,5 tahun, EO hanya kehilangan 2 personilnya.

Pada Februari tahun 1996 pemerintahan Julius Maada menggantikan Strasser. Pemerintahan Sierra Leone yang baru dipimpin oleh Ahmed Tejan Kabba pada 29 Maret dan melanjutkan perang terhadap gerilyawan RUF sehingga pada akhirnya pada 29 November pemerintahan Kabba dan RUF menandatangani perjanjian perdamaian yang berlanjut sampai tahun 1997. Setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut EO keluar dari Sierra Leone karena telah habis masa kontraknya pada Januari 1997.<sup>22</sup>

Namun tidak lama setelah keluarnya EO dari Sierra Leone konflik kembali terjadi sehingga PBB lewat Dewan Keamanannya mengeluarkan resolusi 1181 dimana dalam hal ini memutuskan untuk mengirim *Observer* untuk mengawasi situasi militer, keamanan, pelucutan senjata dan demobilisasi bagi para bekas kombatan yang terlibat dalam konflik sebelumnya demi tercapainya hukum humaniter internasional. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan konflik masih terjadi, sehingga pada 8 Oktober 1997 Dewan Keamanan PBB pun kembali mengeluarkan sebuah resolusi 1132 dimana

dalam hal ini mereka memberikan embargo minyak, persenjataan dan sanksi perjalanan keluar negeri bagi para aktor yang terlibat dalam konflik yang dilakukan. Selain itu ECOWAS sebagai organisasi regional juga semakin gencar dalam melakukan operasi militer yang menggunakan cara kekerasan dalam upaya menangkap para petinggi kelompok yang melakukan kudeta.

Konflik inipun berlanjut sampai tahun 1999 dimana pada saat itu kedua belah pihak melakukan perjanjian yang bernama *Lome Peace Agreement* yang ditandatangani pada 8 Juli 1999. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani PBB pun mengirimkan Pasukan Perdamaianya untuk melakukan pengawasan namun pada bulan Mei 2000 kelompok pemberontak RUF kembali melakukan aksi militer dengan melakukan serangan yang dilakukan secara tiba-tiba sehingga membuat 4 anggota Pasukan Perdamaian PBB tewas dan berhasil menculik 500 anggota lainnya.<sup>23</sup>

Melihat adanya peningkatan akan konflik yang terjadi ini Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menambah Pasukan Perdamaian yang ada di Sierra Leone yang semula hanya berjumlah 6.000 personel menjadi 13.000 personel pada 19 Mei 2000. Dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada 30 Maret 2001 jumlah pasukan yang dikirim ke Sierra Leone pun meningkat menjadi 17.500 personil dimana hal ini dilakukan untuk memaksa pihak yang berkonflik untuk melakukan perdamaian. Sehingga pada akhirnya di tahun 2002 konflik yang terjadi dinyatakan telah selesai dengan diiringi Pemilihan Umum. Setelah diadakan Pemilihan Umum, Pasukan Perdamaian PBB (UNPKO) yang dinamakan pasukan UNAMSIL (*United Nations Mission in Sierra Leone*) pun menetap disana selama 3 tahun untuk membantu proses *Peacekeeping* dengan cara turut serta membangun fasilitas yang rusak yang diakibatkan oleh konflik maupun

---

<sup>22</sup> Jeremy Harding, "The Mercenary Business: 'Executive Outcomes,'" *Review Of African Political Economy* 24 (71): 87-97.1997. doi:10.1080/03056249708704240.

---

<sup>23</sup> Ferzana Rizfi, "UN Peacekeeping Mission In Sierra Leone: Pakistan's Role". *Journal Of Pakistan Vision* 18 (1): 61. 2017

melakukan penjagaan keamanan agar mencegah konflik tidak terjadi lagi. Setelah itu pada 31 Agustus 2005 UNIOSIL (*United Nations Integrated Office for Sierra Leone*) dibangun dan mulai beroperasi pada Januari 2006 dan pada Oktober 2008 UNIPSIL (*United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone*) dibangun dan beroperasi sampai Maret 2014 untuk memastikan konflik tidak kembali terjadi.

Dengan berakhirnya tugas UNAMSIL yang berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun, terdapat 192 anggota Pasukan Perdamaian tewas akibat konflik dan biaya yang dikeluarkan untuk operasi perdamaian ini pun diperkirakan memakan biaya sebesar \$2.8 miliar.<sup>24</sup> Melihat dari adanya perbedaan cara pencapaian perdamaian dari kedua belah pihak tersebut baik PMC's maupun UNPKO memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dalam tulisan ini akan ditelaah kembali menggunakan konsep Efektivitas Militer yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keempat atribut tersebut akan dijelaskan didalam tabel di bawah ini.

---

<sup>24</sup> "United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) Brief". *African Politics, African Peace*. 2017  
<https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Sierra-Leone-brief.pdf>.

Efektivitas Militer	UNPKO / PBB	PMC's (EO)
<b>Integrasi Aktivitas Militer</b>	PBB secara total mengerahkan sekitar 15.000 tentara yang terdiri dari 24 negara berbeda (Kebanyakan dari Ghana, India, Yordania, Kenya, Nigeria, dan negara berkembang lainnya). Mereka memiliki tingkat latihan dan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya.	<i>Executive Outcome</i> mengerahkan sekitar 80 sampai 350 tentara yang sebelumnya tergabung kedalam SADF. Mereka telah terlatih dan terbiasa dengan tugas mengatasi masalah pemberontakan yang seringkali terjadi di wilayah benua Afrika. Mereka memiliki latihan yang sama dan menggunakan bahasa yang sama dalam bertugas.
<b>Respon Keadaan Konflik</b>	Mereka memiliki doktrin yang berbeda antara satu pasukan dengan pasukan negara lainnya, sehingga kepentingan nasional negara asal masih terbawa. Dikarenakan kekurangan dukungan logistik, pasukan PBB yang dikirim ini enggan untuk menggunakan helikopter dan pesawat tempurnya.	Dikarenakan tentara <i>Executive Outcome</i> datang dari sumber yang sama, mereka memiliki doktrin yang sama. <i>Executive outcome</i> pun tidak ragu dalam menggunakan peralatan tempur yang dimilikinya seperti penggunaan helikopter tempur <i>Mil Mi-24 Hind</i> dalam konflik di Sierra Leone.
<b>Kemampuan Personil</b>	Dikarenakan banyaknya kontingen pasukan perdamaian yang datang, menyebabkan adanya perbedaan kemampuan personil. Diantara kontingen yang datang, tentara yang memiliki kemampuan yang cukup baik adalah tentara Nigeria dan Inggris. Namun ketika tentara kontingen Nigeria terkepung oleh RUF, mereka lebih memilih menyerah dan memberikan senjata mereka kepada RUF. Berbeda dengan tentara Inggris dimana mereka mengirimkan pasukan khususnya yang lebih efektif.	Dengan banyaknya misi yang telah dilakukan di wilayah Afrika, para tentara <i>Executive Outcome</i> telah terlatih dalam menanggulangi pemberontakan. Terlebih lagi tentara <i>Executive Outcome</i> yang datang dari <i>SADF 32<sup>nd</sup> Battalion</i> memiliki sejarah sebagai salah satu pasukan khusus yang paling berhasil dalam misi spionase dan penanggulangan pemberontakan.
<b>Kualitas Persenjataan</b>	Dalam melakukan tugasnya tentara PBB seringkali tidak didukung dengan kemampuan logistik yang cukup seperti truk, kendaraan lapis baja,	<i>Executive Outcome</i> memiliki banyak persenjataan yang datang dari bekas logistik Uni Soviet seperti helikopter <i>serang Mi-8, Mi-17 dan Mi-24</i> yang

	ambulans, alat komunikasi sehingga efektivitas dari pasukan tersebut menjadi terganggu.	digunakan untuk memukul mundur pemberontak RUF dari ibukota Sierra Leone yaitu Freetown.
--	---	--

### Kesimpulan

Perbandingan efektivitas militer antara PMC's dengan PBB dapat terlihat dari sisi bagaimana mereka merespon adanya kekerasan yang terjadi di wilayah konflik tersebut. Dalam hal ini PMC's lebih aktif terlibat ke dalam konflik yang terjadi dengan cara membela pemerintahan yang sedang berjalan dan berupaya untuk mengusir pihak-pihak yang mengganggu jalannya pemerintahan dan mengganggu keamanan tersebut. Setelah kondisi *negative peace* tercapai, barulah perjanjian perdamaian dapat ditandatangani atau disepakati oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan PMC's yang menggunakan kekerasan untuk memaksa pihak yang menimbulkan konflik untuk mundur dan menyepakati perjanjian perdamaian. Pasukan Perdamaian PBB atau UNPKO lebih mengarah sebagai penengah atau orang ketiga yang hadir didalam konflik yang bertujuan untuk memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan memikirkan bagaimana caranya agar konflik dapat berhenti dan tidak terulang kembali tanpa adanya asas pemaksaan.

Setelah melihat perbandingan Efektivitas Militer dari kedua pihak tersebut, penulis memiliki pendapat bahwa PMC's memiliki kelebihan yang tidak dapat dikesampingkan bagi para pengambil keputusan yang memiliki kewajiban untuk meredakan konflik. Dikarenakan selama kekerasan masih ada dan berlangsung, perjanjian perdamaian yang disepakati cenderung tidak akan membuahkan hasil yang baik karena tidak adanya pihak yang dapat memaksa dan mengawasi apabila perjanjian tersebut dilanggar akan memiliki konsekuensi tersendiri bagi pihak yang melanggarnya. Selain dengan adanya hal itu, biaya yang diperlukan dalam penanggulangan konflik yang dijalankan oleh PMC's pun tergolong murah dan tidak perlu merundingkan di Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu

mengenai negara yang akan bertanggung jawab akan resolusi konflik di negara tersebut. Terlebih lagi dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para personel PMC's pun terbukti telah mengurangi korban jiwa yang tidak diinginkan dari konflik tersebut.

### Daftar Pustaka

- Agbu, Osita. (2006). *West Africas Trouble Spots and the Imperative for Peace-building (Monograph Series)*. African Books Collective., pp 32
- Brooks, Risa, and Elizabeth A. Stanley. (2007). *Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness*. Stanford, CA: Stanford University Press
- Coning, C. D. (2017). Peace enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between the African Union and United Nations. *Contemporary Security Policy*, 38(1). doi: 10.1080/13523260.2017.1283108
- Dougherty, James E., and Robert L. Pfaltzgraff. (2008). *Contending Theories of International Relations: a Comprehensive Survey*. New York, NY: Longman
- Findlay, Trevor. (2002) *The Use of Force in UN Peace Operations*, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press
- Gahan, Anita M. (2009). *Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry After the Cold War*. Rotman School of Management. University of Toronto
- Gerson, Allan, (2001) "Peace Building: The Private Sector Role", *The American Journal of International Law*, Vol. 95, No.1, pp. 102-119
- Gwatiwa, Tshepo T. (2016). *Private Military and Security Companies Policy in Africa: Regional Policy Stasis as Agency in*

- International Politics*, Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies vol. 44 No.2.
- Harding, Jeremy. (1997). "The Mercenary Business: 'Executive Outcomes'". *Review Of African Political Economy* 24 (71): 87-97. doi:10.1080/03056249708704240.
- Hough, Leslie. (2007). *A Study of Peacekeeping, Peace-enforcement and Private Military Companies in Sierra Leone*. *African Security Review* 16, no. 4: 10-11. doi:10.1080/10246029.2007.9627441.
- Howe, Herbert M. (1998). *Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes*. *The Journal of Modern African Studies* 36, no. 2: 307-31. doi:10.1017/s0022278x98002778.
- Jacobsen, C. G., Galtung, J., & Brand-Jacobsen, K. F. (2014). *Searching for Peace The Road to Transcend*. London: Pluto Press.
- Jefferies, Ian D. (2002). *Private Military Companies – A Positive Role to Play in Today's International Systems*. Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes
- Johnson, U. (2018). *West Africa: From Peacekeeping to Peace Enforcement, Conflict Studies Quarterly*. pp 12
- Linti, Tina. (2016). *UN Use of Private Military and Security Companies in Peacekeeping Operations-Is There a Legal Basis*, *Politikon: IAPSS Political Science Journal* vol. 29. pp 142-145
- McGrew, T. (1988). *Security and Order: The Military Dimension*, dalam Johnson, U. (2018). *West Africa: From Peacekeeping to Peace Enforcement, Conflict Studies Quarterly*. pp 7
- Rachmat, Angga Nurdin. (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta. pp.160
- Richmond, Oliver P. (2008). "Reclaiming Peace in International Relations." *Millennium: Journal of International Studies* 36, no. 3. <https://doi.org/10.1177/03058298080360030401>.
- Rizfi, Ferzana. (2017). *UN Peacekeeping Mission In Sierra Leone: Pakistan's Role*. *Journal Of Pakistan Vision* 18 (1): 61.
- Selber, Jesse, Jobarteh, Kebba, (2002) "From Enemy to Peacemaker: The Role of Private Military Companies in Sub-Saharan Africa" *Medicine & Global Survival*; Vol.7. No. 2.
- Spearin, C. (2011). *UN Peacekeeping and the International Private Military and Security Industry*. *International Peacekeeping*, 18(2). doi: 10.1080/13533312.2010.546099
- Singer, P. W. (2008). *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca, NY: Cornell University Press
- United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) Brief. (2017). *African Politics, African Peace*. <https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Sierra-Leone-brief.pdf>.